

SISTEM DATA TERINTEGRASI TERINTERKONEKSI UNTUK DATA PILAH GENDER DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

¹Rahmi Syahriza, ²Nasrillah, ³Nurasiah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, Indonesia

Email: ¹rahmi.syahriza@uinsu.ac.id ²Nasrillah@uinsu.ac.id
³Nurasiah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The decree of Ministry of Education no. 84/2008, which set forth gender mainstreaming in educational field, brings to the consequence for executing the Gender Responsive Based Planning and Financing Management (GRPF). Meanwhile, this management of GRPF is only possible if the differentiated data gender is provided. This research is directed to know the policy and the statute of UIN-SU on the gender mainstreaming in the teaching-learning system and the institution management. Also, to know the steps and technological infrastructure needed in order that UIN-SU can create the gender data which is integral and interconnected. This research is a qualitative one and will conduct the PAR method. The findings of the research, among others, are First; the policy and the statute of UIN Sumatera Utara has not specifically mentioned about gender perspective and gender mainstreaming. Secondly; To create a system of gender data differentiation, some steps are needed to be done, i.e.; early observation and survey on the condition of gender data differentiation within the faculties and related units; socializing and discussing the result of the survey to the head and the decision maker in order to formulate the problem; Thirdly, The necessity to create the data gender differentiation in UIN-SU which should be coordinating with and handed in to the volunteer as well as IT experts (in this case PUSTIPADA UIN-SU). The execution of the data gender providing will be another step and being part of follow up in a research with PAR method. The steps that the IT team did are; 1). Workshop for creating software of data gender differentiation; 2). Processing the existing system which is integral and connected to all faculties and office unit; 3). Producing regulation of the using and utilizing the systems.

Keywords : Creating data gender differentiation systems, Terintegrasi, and Terinterkoneksi.

ABSTRAK

Keputusan Menteri Pendidikan no 84/2008 menetapkan pelaksanaan Pengarus-Utamaan Gender di bidang Pendidikan di lingkungan institusi Kemendikbud, yang hal ini berkonsekuensi pada keharusan mengimplemetasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Selanjutnya, implementasi PPRG itu sendiri hanya mungkin dilakukan bila tersedia data gender yang terpilah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui kebijakan dan statuta UIN-SU tentang Pengarus-Utamaan Gender di bidang belajar dan manajemen institusi Pendidikan. Juga, untuk mengetahui tahap tahapan dan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan agar UIN-SU dapat menciptakan data gender

terpilah yang terintegrasi dan terkoneksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode PAR. Temuan penelitian ini, antara lain, pertama; kebijakan dan statuta UN-SU belum secara spesifik mencantumkan perspektif gender dan pengarus-utamaan gender. Kedua; Untuk menciptakan data gender terpilah diperlukan langkah-langkah berikut; 1. Observasi dan survey tentang kondisi data gender terpilah di sejumlah fakultas dan unit-unit terkait. 2. Menginformasikan dan mendiskusikan hasil survey kepada pengambil kebijakan dalam rangka merumuskan masalah. 3. Kepentingan pembuatan data terpilah gender di UIN-SU, yang harus dikordinasikan dan diserahkan kepada tenaga IT (dalam hal ini PUSTIPADA UIN-SU). Pengerjaan ini merupakan follow up dan bagian tidak terpisah dari suatu penelitian PAR. Langkah-langkah yang mereka lakukan yaitu: (1). Workshop pembuatan data pilah gender; (2). Membuat sistem eksisting yang terintegrasi dan terinterkoneksi; (3). membuat regulasi terkait pemberlakuan data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi.

Kata Kunci: Mengkreasi sistem data pilah gender, Terintegrasi, dan Terinterkoneksi

PENDAHULUAN

Diawali dengan keikutsertaan pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), dalam bentuk UU no. 7 tahun 1984. Selanjutnya ratifikasi Platform Beijing 1995 tentang kesetaraan Gender Dalam Pembangunan yang menghasilkan kebijakan PUG (pengarus-utamaan gender) melalui Instruksi Presiden no. 9 tahun 2000 tentang PUG. Ada lagi deklarasi Dakkar tahun 2000 yang diimplementasikan dengan

kebijakan Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) dan berikutnya Deklarasi millenium atau *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 yang di *break-down* menjadi 8 tujuan Pembangunan Millenium yang berkelanjutan. Lalu, PUG ini menjadi strategi yang diarus-utamakan dalam kebijakan pembangunan nasional RPJMN tahun 2015-2019. Dapat dilihat dari uraian di atas bahwa keharusan implementasi keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang telah dikawal dengan sejumlah peraturan formal dan mengikat dengan cukup kuat hingga ke tingkat Undang-Undang.

Peraturan PUG juga telah diturunkan secara terfokus pada keseluruhan bidang kerja sektoral departemen. Di antara yang paling fundamental dan strategis adalah kebijakan PUG di bidang pendidikan yang secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarus-utamaan gender di bidang pendidikan. Dikatakan fundamental dan strategis karena lembaga pendidikan adalah lembaga transfer nilai, ide, pemikiran dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan institusi dinamis yang menyiapkan, memproduksi dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia. Lembaga pendidikan mereproduksi ideologi atau doktrin tertentu baik melalui proses kebijakan atau via inkulturasi atmosfer kerja. Sementara civitas akademika dalam lembaga pendidikan terdiri dari perempuan

dan laki-laki, yang secara sama berhak mengekspresikan segala potensinya, mengaktualisasikan dan mendefinisikan identitas dirinya masing-masing. Dikarenakan menyangkut faktor manusia dan proses perkembangan diri dan pemikirannya, maka adalah sangat fatal bila aktivitas, proses dan kebijakan Perguruan Tinggi terlaksana tanpa sensitifitas gender dan paradigma gender, atau dilakukan secara *non gender awareness* atau *gender neutral* (netral gender). Apalagi sampai terjadi bias gender atau *gender inequity* dan *in-equality* (ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender). Akan ada banyak potensi SDM yang terbuang maupun yang tidak dikembangkan. Begitu pula, pengaruh dan efek pemikiran bias gender akan berdampak fatal dan mengenai satu generasi masyarakat mengingat produk PT bukan berupa barang yang direkayasa menjadi *used* atau *un-used*. Melainkan, berupa

sosok-sosok yang akan merekayasa manusia dan masyarakat.

Akan tetapi, setelah 17 tahun sejak penetapannya sebagai suatu kebijakan pembangunan, strategi PUG belum terlaksana secara merata dan belum menampakkan hasilnya yang seharusnya. Para ahli menyadari bahwa program PUG dalam pembangunan tidak akan tereksekusi dengan baik dan riil bila tidak menyentuh hulu keseluruhan kerja pembangunan, mengintervensi muara dari keseluruhan gerak pembangunan serta merevisi desain inti dari keseluruhan rencana pembangunan. Ini semua merujuk kepada satu kata yaitu dana, pembiayaan dan penganggaran keuangan. Menyadari hal ini, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait penganggaran pembangunan yang menjadi paket dari PUG untuk tujuan percepatan PUG, yang disebut dengan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Selain PPRG, dikenal juga istilah GBS

(gender budget statement) yang merujuk kepada dokumen analisis yang menjadi *baseline* dalam pengalokasian Anggaran untuk suatu bidang atau program *Agar Responsif Gender (ARG)*. Ssekarang ini pemerintah di semua instansi dan terhadap SKPD dari berbagai daerah tengah menggalakkan kegiatan menganalisis program-program dan kebijakan dari berbagai instansi dalam kerangka analisis gender dengan memakai sejumlah metode yang telah dirumuskan para ahli. Yang umum dipakai dan diadopsi saat ini adalah metode *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Hal yang menjadi point penting dari uraian latar belakang di atas hingga memunculkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa Peraturan PUG telah mendapat dasar hukum yang kuat termasuk penerapannya di lembaga pendidikan dan Pendidikan Tinggi. Kemudian, bahwa untuk menerapkan PUG di suatu instansi secara tepat, cermat dan cepat diperlukan suatu

langkah analisis tentang kondisi ketimpangan gender di instansi dimaksud untuk dituangkan dalam satu dokumen GBS, yang ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan anggaran pembangunan, program serta kegiatan kerja instansi tersebut, yang disebut dengan Anggaran Responsif Gender. Permasalahannya, untuk membuat GBS tersebut, salah satu prasyaratnya adalah tersedianya data pilah gender pada berbagai unit kerja yang akan menjadi unit analisis. Artinya, ketersediaan data pilah baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif adalah mutlak dalam upaya melaksanakan program pemerintah tentang PUG. Sementara itu, fakta yang umumnya diketahui bahwa sistem data di instansi-instansi yang ada belum didesain sebegitu rupa untuk secara otomatis menyajikan laporan tentang data pilah gender. Inilah juga yang menjadi fakta dan keadaan di lembaga PT Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artinya, bila UIN SU ingin

melakukan yang terbaik melaksanakan bunyi peraturan Menteri tentang PUG maka UIN-SU membutuhkan suatu kondisi ketersediaan data pilah gender yang dihasilkan melalui sistem data yang mendukung dan mudah serta cepat, yaitu yang terintegrasi dan terinterkoneksi.

PERMASALAHAN

Secara jelasnya, perlu dilakukan penelitian dengan metode partisipatoris untuk memberikan solusi terhadap kondisi absennya data pilah dan permasalahan interkoneksi data. Pertanyaan-pertanyaan pemantik bisa dimulai dari Bagaimana kebijakan dan statute UIN-SU untuk sistem pembelajaran dan manajemen lembaga yang adil gender? Selanjutnya, Apakah tersedia dan bagaimana agar tersedia perangkat struktur dan infrastruktur untuk sistem data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi di UIN-SU ? Apa manfaat dan dampak yang terjadi terhadap sistem

pembelajaran dan kualitas kinerja yang diharapkan akan dicapai di UIN-SU dengan terbangunnya sistem data pilah gender dan interkoneksi data ? Dengan ditelusurinya permasalahan ini maka akan diketahui pra-kondisi dan kesiapan software dan hardware pembuatan sistem data pilah gender terintegrasi terinterkoneksi. Begitu juga, kesiapan daya dukung struktur, infrastruktur, dan suprastruktur dalam pembuatan data pilah gender terinterkoneksi di UIN-SU. Yang menjadi langkah selanjutnya adalah menginisiasi desain dan pemetaan kerja awal pembuatan data pilah gender secara terintegrasi dan terinterkoneksi ke seluruh unit dan sistem kerja UIN-SU. Outputnya berguna selain untuk syarat pembuatan dokumen analisis gender (GBS) juga untuk bahan direktori dan sumber data bagi para peneliti gender. Sistem data pilah gender terintegrasi terinterkoneksi di UIN-SU akan menjadi format contoh untuk pembuatan sistem data pilah

gender di PT lainnya. Dengan pemetaan ini UIN-SU telah melakukan follow-up MOU dan menyebar-luaskan hasil dan signifikansi kerjasama program PPRG antara UIN-SU dengan bagian Perencanaan PENDIS KEMENAG.

METODE

Sebagaimana halnya penelitian terapan dengan metode PAR, maka penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kondisi yang Diharapkan

Berkaitan dengan fakta yang ditemui di lapangan, maka diharapkan agar data pilah gender di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara segera diadakan. Data pilah ini bisa mendukung terlaksananya GBS (*Gender Based System*). Adanya sistem GBS memberikan efek positif terkait kebijakan gender di UIN Sumatera Utara.

2. Strategi Program

Agar data pilah gender dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa strategi yang akan dilakukan, diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang data pilah.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keahlian civitas akademika UIN tentang kepentingan data pilah.
- 3) Melibatkan pihak yang berkompeten di UIN dalam pembuatan sistem data pilah gender.

3. Langkah-Langkah Program Aktivitas

Agar pembuatan data pilah gender di UIN Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik, maka akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi masalah

Sebelum membuat sistem, maka perlu diketahui terlebih dahulu terkait masalah tentang

data pilah gender di UIN Sumatera Utara. Untuk mendapatkan data, maka dilakukan penelusuran dan wawancara kepada kepala pustipada UIN Sumatera Utara. Selain itu, juga dilakukan penelusuran ke setiap fakultas dan unit kerja yang ada di UIN Sumatera Utara.

2) Sosialisasi hasil identifikasi masalah

Agar pembuatan sistem dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang data pilah gender yang ada di UIN Sumatera Utara. Hal ini bertujuan agar setiap pejabat dan pihak yang terkait di UIN Sumatera Utara mengetahui tentang data pilah gender di UIN Sumatera Utara, sehingga untuk ke depannya bisa merancang dan membuat anggaran yang responsif gender.

3) Menggugah kesadaran

Sebelum membuat sistem serta anggaran yang responsif

gender, maka perlu ada sosialisasi untuk menggugah kesadaran civitas akademika khususnya pejabat tentang pentingnya data pilah gender.

4) Pemecahan masalah

Ketika setiap pejabat sudah menyadari tentang pentingnya data pilah gender di perguruan tinggi, maka tindakan selanjutnya adalah pembuatan sistem yang berbasis data pilah gender untuk semua data yang ada di UIN Sumatera Utara, diantaranya data akademik mahasiswa, data pegawai dan dosen, serta data-data lainnya. Pembuatan sistem ini hendaknya terintegrasi dan terinterkoneksi dari pusat data yang ada di biro rektor sampai ke tingkat fakultas dan unit kerja yang ada di UIN Sumatera Utara.

5) Membangun komitmen dan kapasitas

Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan dan pembuatan sistem data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi

dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Jika semua civitas akademika sudah berkomitmen untuk melaksanakannya maka tentunya kapasitas UIN Sumatera Utara dengan slogannya UIN SU JUARA juga akan meningkat dan bisa menjadi contoh juga bagi perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara.

6) Sumber Daya Manusia dan Perangkat yang Dimiliki

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, diketahui bahwa UIN Sumatera Utara punya tim ahli yang ditempatkan di bagian pusat teknologi informasi dan pangkalan data yang akan bisa membuat aplikasi terkait data gender.¹ Namun, sumber daya yang ada dianggap masih belum cukup karena juga belum didukung dengan sarana seperti aplikasi khusus terkait data pilah gender yang belum tersedia.

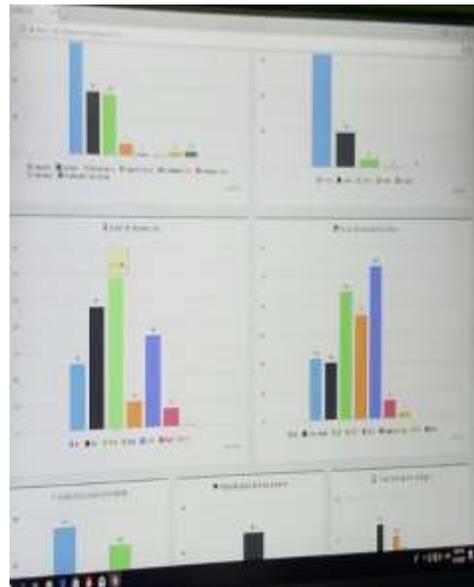
¹ Survei dan wawancara dengan kepala Pustipada UIN Sumatera Utara Juni 2018

7) Peran *Stakeholder*

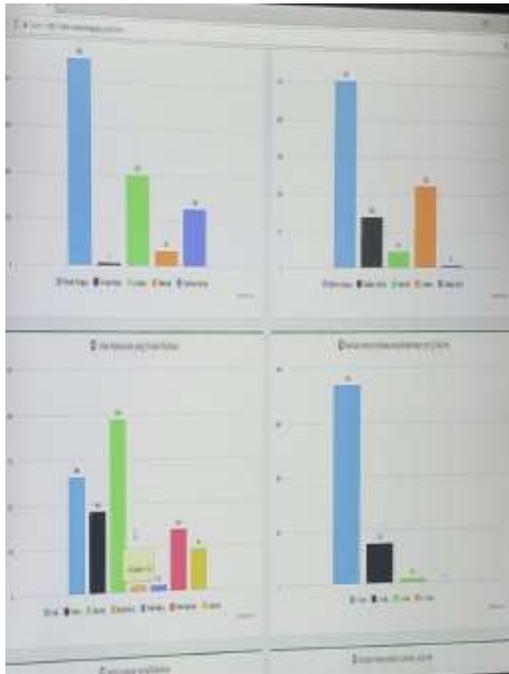
Dalam hal pembuatan sistem data pilah gender yang dirancang terintegrasi dan terinterkoneksi, UIN Sumatera Utara tentunya tidak terlepas dari peran stakeholder. Oleh karena institusi ini secara teknis berada di bawah Kementerian Agama maka dalam hal pembuatan data pilah gender, pihak UIN juga tentunya akan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dalam hal yang terkait dengan gender, maka UIN juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai bahan acuan dan perbandingan, maka dilakukan survei dan observasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Utara berkoordinasi

dengan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga baru saja mendirikan subdit baru yaitu subdit data, di mana gunanya melakukan upaya untuk aplikasi data pilah gender. Sebelumnya, untuk data pilah gender secara umum yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara sudah juga menggunakannya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Gambaran Data Pilah Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2. Gambar Diagram Data Pilah Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana yang telah terlihat pada gambar bahwa beberapa data pilah gender di Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara sudah dibuat dan bahkan sudah bisa diakses melalui website <http://kemenppa.go.id>. Akan tetapi, menurut informasi yang diperoleh dari kepala sub bagian Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa secara teknis dan regulasi untuk legalitas pembuatan data pilah

gender khusus untuk Provinsi Sumatera Utara belum ada. Peraturan Gubernur yang sudah ada baru mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 81 tahun 2017.² Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa data pilah gender dan anak menjadi bagian dari penyusunan buku Daerah Dalam Angka.³

Dengan adanya peraturan Gubernur Sumatera Utara ini diharapkan akan terbit lagi kebijakan dan regulasi berikutnya yang lebih fokus menjelaskan tentang aturan dan format pembuatan data pilah gender Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait untuk

² Wawancara dengan bagian data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 Juli 2018

³ Bab VII Ketentuan Lain Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 tahun 2017, hal. 15

pembuatan data pilah gender di masing-masing SKPD. Oleh karena, dalam data pilah gender dan anak nanti akan diberikan informasi tentang data kekerasan perempuan dan anak, pendidikan, ekonomi yang tercakup juga di dalamnya informasi tentang perempuan yang bekerja, perempuan yang menjadi kepala keluarga atau *single parent*, kesehatan, kepegawaian yang mencakup data perempuan yang berada dalam jabatan tertentu, dan lain sebagainya. Untuk rancangan format atau model data pilah gender yang akan diisi

C.2. Penelitian ini dilaksanakan dengan metodologi atau langkah-langkah penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan penelitian terapan. Metode yang digunakan akan disesuaikan dengan arah penelitian ini

sebagai penelitian terapan sosial yaitu metode riset aksi partisipatoris (RAP). Karenanya, penelitian ini bersifat kualitatif.

Penelitian riset aksi partisipatoris memiliki karakter dan prinsip khusus yaitu meletakkan keterlibatan subjek penelitian sebagai bagian penting dalam analisis dan proses. Dengan metode ini maka orientasi riset diarahkan untuk melakukan usulan-usulan perubahan dalam proses yang dialektikal, yakni dikembangkan dalam spirit “aksi - refleksi – aksi”. Ada tiga pilar penting untuk membaca secara utuh dimensi riset aksi ini, yakni : metodologi riset, dimensi aksi dan dimensi partisipatoris. Tiga pilar itu lebih jelasnya akan mengatakan bahwa “Riset Aksi Partisipatoris” dikerjakan dengan mengacu pada 1) Paradigma dan metodologi riset tertentu yang disepakati bersama masyarakat, 2) Harus diorientasikan untuk

melakukan aksi perubahan dan transformasi sosial, dan 3) Dalam praktiknya riset ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses riset sosial.

2. Objek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian partisipatoris, objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan lembaga dan warga pengguna Perguruan Tinggi UIN-SU yaitu data pilah gender dan dokumen analisis gender. Informan penelitian adalah subjek penelitian itu sendiri yang sekaligus akan diposisikan sebagai peneliti juga, yaitu warga dan masyarakat UIN-SU yang akan direpresentasikan oleh fungsional-fungsional penginput data di masing-masing unit. Rumusan-rumusan masalah selalu dilahirkan secara bersama-sama oleh peneliti dan subjek peneliti. Di sini, ditekankan

peran penting “dialog” menyeluruh di antara peneliti dan subjek peneliti atau warga UIN-SU. Hubungan yang terbangun antara peneliti dan masyarakat UIN-SU tidaklah dalam peran deterministik “subjek – objek” melainkan “subjek –subjek”.

3. Metode Pengumpulan Data

Relevan dengan penjelasan di atas, maka pengumpulan data pada riset aksi partisipatoris dilakukan dengan metode-metode yang mengaplikasikan partisipasi. Proses RAP (Riset Aksi Partisipatoris) adalah proses penelitian yang di setiap tahapannya terjadi penggalian data melalui diskusi antara peneliti dan subjek penelitian. Sejak awal telah terjadi persetujuan bersama, lalu desain riset bersama, berbagi bersama dan koleksi data gabungan, lalu terakhir analisis data bersama.

Dengan memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus berkembang, RAP melengkapi diri dengan banyak metode dan alat kerja. Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, RAP memiliki metode berbagi cerita (*sharing*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (*mind mapping*), diagram pohon masalah (*problem tree*), grafik kecenderungan (*trend lines*), matriks peringkat atau skala prioritas (*ranking*), diagram keterkaitan/diagram afinitas (*linkage diagram*), dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan digunakan penggalan data

melalui FGD dengan sejumlah alat kerjanya yang nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang didasarkan oleh data. Analisis kualitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat.

Dalam penelitian kualitatif dengan metode RAP, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Bahwa kesimpulan bukanlah output dari penelitian model ini melainkan tindakan aksi untuk perubahan. “Riset Aksi

Partisipatoris” tidak diorientasikan untuk melakukan kesimpulan atas hipotesa kita tentang masyarakat, melainkan menjadi “alat dan senjata analisis” untuk mendorong berbagai perubahan sosial. Karena itu, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dan analisa data adalah analisis berbasis komunitas. (Denzin, Norman K & Lincoln Yvonna, 2009: 439).

Bila diikuti maka analisis akan mengikuti 3 siklus; kesepakatan atas desain; analisis berbasis komunitas, dan perubahan masyarakat. Masing-masing siklus meliputi tahapan berikut :

- a) Planning atau Perencanaan
- b) Pelaksanaan dan observasi
- c) Refleksi
- d) Revisi perencanaan (Model PTK Kemmis &

Taggart (sumber: Denzin, K Norman, & Lincoln Yvonna, 2009:470)

Hasil pengamatan kemudian dievaluasi dalam bentuk refleksi. Apabila hasil refleksi menunjukkan belum adanya perbaikan sesuai yang diinginkan maka kemudian disusun kembali rencana perbaikan yang akan dilakukan dalam siklus berikutnya. Hal demikian terus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan data pilah gender tercapai.

KERANGKA TEORI

Sejak beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG), yang dimulai dengan dikeluarkan PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 diperbarui dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial. Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan pengalaman, spirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Penelitian ini didasarkan atas sejumlah kerangka teori berikut :

- a. Peraturan-Peraturan tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Perguruan Tinggi dan di Lingkungan Kementerian Agama serta di PT UIN-S.
- b. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025..
- c. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019.
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. PMA Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksanaan, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama.
- h. PMA Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemberian Beasiswa Responsif Gender bagi Siswa Madrasah dan Mahasiswa PTAI

dari Keluarga Miskin di Lingkungan Kementerian Agama.

- i. Kesepakatan Bersama 4 Kementerian (melalui surat edaran) tentang strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- j. MOU UIN-SU dengan Kemeneg PP tentang integrasi PUG di UIN-SU dan Kerjasama dengan Pendis KEMENAG tentang PPRG.
- k. Regulasi Keuangan Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan Negara Nomor 94/PMK.0/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- l. Regulasi Keuangan Negara yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI No. 143/PMK.02/2005 Tentang Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

ANGGARAN RESPONSIF GENDER

- a. Pengertian Anggaran Responsif Gender (ARG)

ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan “*keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta*

mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.”

ARG bertujuan untuk mengurangi kesenjangan bagi penerima manfaat pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan.

b. Prinsip Dasar ARG

Pertama, ARG bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; Kedua, ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; Ketiga, Alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; Keempat, Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; Kelima, Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender karena ada juga program yang netral gender. Keenam, ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, output) dalam RKA K/L/. Ketujuh, secara

spesifik ARG membidik pada level out-put. Kedelapan, ARG bukan fokus pada penyediaan dana tertentu untuk PUG, namun bagaimana anggaran pemerintah bermanfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki.

Kategori ARG terdiri dari a) ARG target khusus gender, b) Anggaran kesetaraan gender, c) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender.

Ada beberapa syarat agar ARG bisa terlaksana. Pertama; kemauan politik (*political will*) dari pimpinan yang tertuang dalam dokumen kebijakan: Visi, Misi, RPJMN, RKP, Renstra K/L, RENJA K/L). Kedua; partisipasi/keterlibatan semua pihak. Ketiga; sumber daya manusia yang memadai (yang paham konsep gender dan mampu melakukan analisis gender). Keempat; Ketersediaan Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin.

c. Data Pilah Gender

Kegunaan penyusunan data pilah pendidikan berdasarkan jenis kelamin adalah:

- Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda.
- Melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, perempuan dan laki-laki, berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak.
- Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak yang bekerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.
- Sebagai data untuk melakukan analisis gender.
- Guna mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yg paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki. Ruang lingkup data pilah.

- Sistem Informasi Mahasiswa Baru
- Sistem Informasi Kelulusan, Beasiswa, Bidik Misi, Alumni dan Karir, Pejabat dan Pengambil Kebijakan, Penelitian, Pengabdian, Perpustakaan, Dosen, Kepangkatan, Karya Akademik,

Data pilah gender di atas akan diarahkan untuk memahami dan menganalisis serta mengefektifkan anggaran untuk:

- Perluasan akses dan pemerataan kualitas pembelajaran ke seluruh mahasiswa secara *gender-based method*
- Mutu dan relevansi pendidikan
- Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

KAJIAN TERDAHULU

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan analisis Gender, namun tentunya dengan topik,

dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Chusnul Hayati (2006), dengan judul Gender dan Perubahan Ekonomi: Peranan Perempuan Dalam Industri Batik di Yogyakarta 1900-1965. Peneliti menemukan bahwa kemerosotan ekonomi di DIY pada abad ke-19 telah membuat perempuan mengambil posisi untuk pencari nafkah melalui kerajinan batik. Industri dan perdagangan batik telah memberikan peluang ekonomi bagi perempuan. Proses pembuatan batik tradisional/canthing lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan dari pada laki-laki. Beralihnya kegiatan yang bersifat non profit menjadi kegiatan yang bersifat komersial mengakibatkan banyak bermunculan industri-industri rumah tangga memproduksi batik. Dengan beralihnya batik menjadi hasil industri mendorong perbaikan ekonomi keluarga.

Sementara penelitian kedua yang dilakukan oleh Mufidah Ch

(2007), dimana peneliti melihat Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam konteks Sosial, Budaya dan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai macam hal sosial terkait Bias Gender yakni Realitas ketidakadilan sosial di masyarakat, termasuk di dalamnya ketidakadilan gender terabaikan karena norma yang dibangun atas nama tafsir agama tidak dapat dipertemukan dengan realitas umat beragama. Bagi yang mempertahankan teks secara normatif, skripturalis akan terjebak pada sikap dualistik yakni, di satu sisi norma yang tidak boleh bergeser, di sisi lain realitas umat yang terus berkembang.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fahriah Tahar (2007), dimana peneliti melihat Pengaruh Diskriminasi Gender dan Pengalaman Terhadap Profesionalisme Auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

profesionalitas auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalitas auditor.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Farida Hanum (2010), dimana peneliti mengkaji Analisis Kesetaraan Gender di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat

dirangkum beberapa penelitian yang terkait dengan Gender dengan waktu penelitian mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah digambarkan di atas. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas tentang sistem data pilah gender di perguruan tinggi dengan metode kualitatif PAR.

HASIL PENELITIAN

A. Sosialisasi Masalah Data Pilah Gender UIN Sumatera Utara

Perencanaan penganggaran responsif gender akan terlaksana ketika data akademik di perguruan tinggi telah memperlihatkan data yang responsif gender. Akan lebih baik ketika data yang tersedia itu sudah tersistem dengan baik. Selain itu, sistem data pilah gender yang dibuat juga hendaknya terintegrasi dan terinterkoneksi mulai dari pusat data universitas sampai ke tingkat fakultas, jurusan, dan program studi.

Namun, kebutuhan akan pentingnya data pilah gender yang tersistem ini masih belum disadari oleh sebagian besar pihak pembuat komitmen yang ada di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sehingga dengan demikian, perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya data pilah gender.

Untuk mensosialisasikan pentingnya data pilah gender ini, maka diadakanlah suatu kegiatan sosialisasi pentingnya data pilah gender di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Ibu Erfaniah Zuhriah. Ada beberapa manfaat penting data pilah gender yaitu:⁴

1. Digunakan untuk membuat keputusan oleh pimpinan (*decision makers*)
2. Sebagai dasar penyusunan perencanaan kegiatan dan subkegiatan
3. Sebagai alat pengendalian
4. Sebagai dasar evaluasi

5. Untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang
6. Untuk mengetahui potensi dan kelemahan SDM dan dapat menentukan kebijakan yg tepat
7. Identifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki dalam tempat dan waktu.

B. Kondisi Data Pilah Gender di UIN Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang dahulunya dikenal dengan nama IAIN SU didirikan pada tahun 1973 di Medan. Sebagai salah satu universitas Islam negeri yang ada di Sumatera Utara, UIN yang pada awalnya hanya terdiri dari 4 fakultas agama, sekarang sudah berkembang dengan memiliki beberapa fakultas baru dan lembaga baru. Adapun fakultas dan lembaga-lembaga yang ada di UIN Sumatera Utara adalah:

⁴ Erfaniah Zuhriah, *Makalah Data Pembuka Wawasan*, disampaikan pada FGD Sosialisasi Pentingnya Data Pilah Gender pada 03 Agustus 2018 di Medan.

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Fakuktas Syariah dan Hukum
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Fakultas Sains dan Teknologi
7. Fakultas Ilmu Sosial
8. Fakultas Kesehatan Masyarakat
9. Program Pascasarjana yang memiliki beberapa program studi S2 dan S3 yaitu program studi Pendidikan Islam, Pemikiran Islam, Ilmu Hadis, Ekonomi Islam, dan Komunikasi Islam.
10. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipada)
11. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusbinsa)
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
13. Pusat Pengembangan Bisnis
14. Pusat Layanan Internasional
15. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais)
16. Jurnal Miqot
17. Perpustakaan UIN Sumatera Utara
Khusus untuk fakultas dan program pascasarjana, ada lagi beberapa program studi yang bernaung di bawahnya, yang langsung dikelola oleh ketua dan sekretaris prodi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuatan sistem data pilah gender di perguruan tinggi khususnya di UIN Sumatera Utara, pihak Pusat Studi Gender dan Anak sudah pernah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut pada tahun 2017. Bukti kegiatan ini terlihat dalam dokumen

GAP dan GBS UIN Sumatera Utara.⁵

Dalam dokumen itu sudah dijelaskan terkait beberapa tema penting yang akan membutuhkan sistem data pilah gender itu sendiri, yaitu:

1. GAP dan GBS Workshop Peningkatan Mutu Dosen FEBI
2. GAP dan GBS Sosialisasi Perpustakaan Berbasis IT-Tingkat Kunjungan Perpustakaan
3. GAP dan GBS FKM Kreatifitas “Long Life Creativity”
4. GAP dan GBS FKM PBAK
5. GAP dan GBS Sarpras
6. GAP dan GBS Pembimbingan
7. GAP dan GBS Studium General
8. GAP dan GBS Pelatihan Penelitian
9. GAP dan GBS Pengabdian LP2M
10. GAP dan GBS Sosialisasi PPRG
11. GAP dan GBS Pelantikan HMJ FST
12. GAP dan GBS Penyusunan RKAKL
13. GAP dan GBS Perencanaan Keuangan
14. GAP dan GBS Tingkat Kelulusan
15. GAP dan GBS Promosi Akademik
16. GAP dan GBS Diskusi Dosen FUSI
17. GAP dan GBS Sarana Ruang Dosen FIS
18. GAP dan GBS Yudisium Syariah
19. GAP dan GBS Pemutakhiran Kurikulum
20. GAP dan GBS PPL 1

Ilustrasi laporan kegiatannya misalnya :

⁵ Dokumen GAP dan GBS UIN Sumatera Utara, Program PPRG Pendis KEMENAG-UIN Sumatera Utara tahun 2017

dilakukan, diketahui bahwa secara umum, setiap unit dan fakultas sudah memiliki informasi terkait data jenis kelamin, akan tetapi khusus untuk data pilah gender yang terintegrasi dengan semua sistem belum ada.

Sistem data yang diteliti yaitu:

1. Data Akademik Mahasiswa

Data akademik mahasiswa ini terbagi lagi pada beberapa item, yaitu:

- a. Jumlah mahasiswa secara keseluruhan
- b. Jumlah mahasiswa per prodi
- c. Jumlah mahasiswa per prodi per semester
- d. Mahasiswa yang mengurus beasiswa DIPA
- e. Mahasiswa yang mengurus beasiswa Bank Indonesia
- f. Mahasiswa yang mengurus beasiswa Bidik Misi
- g. Mahasiswa aktif
- h. Mahasiswa non aktif/cuti
- i. Mahasiswa yang sudah magang/PKL

- j. Mahasiswa yang sudah mengikuti ujian komprehensif
- k. Mahasiswa yang sudah selesai sidang
- l. Mahasiswa yang sudah mengikuti yudisium
- m. Data alumni.

Sesuai informasi yang diperoleh dari Kepala PUSTIPADA bahwa dalam sistem terkait data mahasiswa, semuanya sudah terintegrasi sampai ke fakultas. Sederhananya, ketika ada yang meminta data mahasiswa di salah satu fakultas, sudah bisa diberikan jumlah total mahasiswa di fakultas yang diminta tersebut. Akan tetapi ketika diminta terkait data jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki di salah satu fakultas, sistem tidak bisa memberikan total jumlah data laki-laki dan perempuan secara otomatis.⁶ Maka untuk mengetahuinya, akan dilakukan

⁶ Wawancara dengan kepala Pustipada UIN SU dan observasi ke bagian Pustipada, akademik dan kemahasiswaan di Biro Rektor dan semua fakultas tanggal 13-24 Agustus 2018

penghitungan secara manual atau dengan sistem yang lain.



Gambar 6. Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat

2. Data pengunjung perpustakaan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala perpustakaan UIN Sumatera Utara bahwa untuk data pengunjung perpustakaan sudah bisa diketahui data pilah gendernya. Hal ini berarti bahwa data mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan sudah dapat diketahui identitas umum mahasiswa seperti nama, NIM, fakultas, dan jenis kelamin. Jadi

ketika ada yang meminta data terkait jumlah pengunjung perempuan dalam 1 hari, pihak perpustakaan sudah bisa memberikan gambaran jumlahnya tersebut.⁷

Sistem informasi data pengunjung yang digunakan oleh perpustakaan diberi nama SI Tanjung (Sistem Informasi Data Pengunjung) perpustakaan. Aplikasi ini sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2017 dan sampai saat ini masih aktif dan eksis. Sehingga untuk data pilah gender bisa dikatakan baru perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah mempraktekkan hasil sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hal ini seperti yang disebutkan oleh Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara: “Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi PPRG yang diadakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sumatera Utara, pihak perpustakaan

⁷ Wawancara dengan kepala perpustakaan UIN SU ibu Triana Santi dan staf perpustakaan Amila tanggal 6 Juli 2018

segera merekomendasikan atau lebih tepatnya meminta kepada tim programmer dari PUSTIPADA agar membuat data pilah gendernya langsung, sehingga data pengunjung yang ditampilkan di aplikasi sudah terlihat data pengunjung berdasarkan jenis kelaminnya untuk setiap fakultas.⁸

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Sistem Informasi Data Pengunjung Perpustakaan UIN Sumatera Utara

⁸ Wawancara dengan Kepala Perpustakaan UIN SU Ibu Triana Santi, MM pada tanggal 6 Juli 2018

3. Data Dosen dan Pegawai

Data dosen dan pegawai di UIN terbagi dalam dua bentuk, ada data dosen dan pegawai PNS kemudian ada data dosen dan pegawai non PNS atau yang lebih dikenal dengan sebutan dosen dan pegawai BLU.

Untuk data dosen yang ada dalam sistem informasi akademik masih bercampur antara dosen PNS, dosen BLU, dan dosen luar biasa. Akan tetapi, data dosen PNS dan dosen BLU UIN Sumatera Utara secara khusus telah dibuat sistem tersendiri yaitu tertuang dalam web <http://kepegawaian.uinsu.ac.id>.

Terkait dengan data pilah gender dosen dan pegawai juga masih sama kondisinya dengan kondisi data pilah gender mahasiswa. Adapun datanya masih terbatas pada informasi tentang status ikatan kerja dan identitas pegawai dan dosen tersebut. Sementara, untuk data jenis kelamin dosen dan pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ditampilkan.

Hal yang sama juga terjadi pada data pegawai dan dosen yang ada di fakultas. Untuk sistem yang berisi data tentang pegawai dan dosen UIN SU sudah ada, akan tetapi data pilah gendernya belum ada. Kasus yang sama dengan sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 8. Sistem Informasi Akademik Data Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari salah seorang kepala sub bagian administrasi umum dan

keuangan Fakultas Sains dan Teknologi:

“Kita belum punya data dosen dan pegawai yang sudah terpilah gender. Data yang ada masih bersifat umum, walaupun ada informasi tentang jenis kelamin tetapi terkadang itu tidak semua, sebagian diantaranya bahkan belum dituliskan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kita tidak tahu berapa jumlah pegawai PNS atau BLU kita yang laki-laki dan perempuan, berapa jumlah dosen PNS dan BLU laki-laki dan perempuan, berapa jumlah dosen luar biasa laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada yang nanya, kita mesti melakukan penghitungan secara manual, buka data lagi.”⁹

⁹ Wawancara dengan kepala sub bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Sains dan Teknologi ibu Asriani, S. Ag dan kasubbag AUK Fakultas Dakwah dan Komunikasi bapak Ilyas Gompas Harahap, kasubbag AUK Fakultas Ushuluddin dan Stusi Islam bapak Arginta

C. Pembuatan Data Pilah Gender

Terkait dengan hasil sosialisasi identifikasi masalah dan pentingnya data pilah gender, maka dipandang perlu untuk membuat sebuah sistem yang menggambarkan data pilah gender terkait semua aspek yang ada di UIN Sumatera Utara, tidak hanya data terkait mahasiswa, dosen dan pegawai, tetapi juga penting data pilah terkait sarana dan prasarana kampus. Hal ini karena akan berimbas terhadap pembuatan anggaran dan kebijakan yang responsif gender.

Dalam hal ini, tim ahli dari pihak Pusat Teknologi Infomasi dan Pengolahan Data Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membuat sebuah sistem eksekutif yang merangkum semua data yang sudah terpilah gender. Sistem ini diberi nama Sistem Informasi Data Pilah Gender yang disingkat SIMILIARDER.

Sistem Informasi Data Pilah Gender merupakan suatu komputasi yang sering digunakan oleh eksekutif suatu organisasi dalam menganalisa masalah dengan tepat dan mendeteksi kecenderungan indikator penting suatu manajemen. Dewasa ini, hampir seluruh kegiatan dari beragam organisasi memerlukan dukungan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan yang tepat terlebih jika data dapat dipilah berdasarkan gender.

Sebuah program studi (selanjutnya disebut prodi) merupakan bagian dari suatu organisasi besar universitas memerlukan suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, sekaligus membantu proses pengambilan keputusan strategis. Kebutuhan eksekutif terhadap data akademik diantaranya adalah informasi mengenai

karakteristik peminat dan mahasiswa baru yang akan dipergunakan untuk membantu menentukan strategi sosialisasi ujian masuk. Sedangkan informasi tentang rasio pendaftar ulang dan jumlah yang diterima dapat dipergunakan membantu membuat strategi perbaikan, serta kebutuhan akan adanya informasi rata-rata lama studi mahasiswa dimanfaatkan untuk membantu proses evaluasi pembelajaran.

Pembangunan *data warehouse* merupakan salah satu cara untuk mengekstrak informasi penting dari data yang tersebar pada beberapa sistem informasi ke dalam suatu penyimpanan terintegrasi yang terpusat dan mendukung adanya kebutuhan akan *data history*. Data terintegrasi ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyampaian informasi yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi dan dapat diatur tingkat rinciannya. Untuk langkah-langkah pembuatan sistemnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perancangan *Data Warehouse*
 - a. Analisis Kondisi Eksisting
 - b. Analisis Kebutuhan dan Penentuan Subjek Data Warehouse
2. Perancangan *Star Schema*
3. Perancangan Proses ETL
4. Pengujian *Data Warehouse*

Dalam proses pembuatan sistem ini ada beberapa halangan yang ditemukan terkait dengan kualitas dan kuantitas data. Hal ini disebabkan sebagian besar data masih ada yang belum sinkron. Diantara bentuk halangan yang ditemukan adalah:

1. Adanya data mahasiswa non aktif yang belum diproses, seperti mahasiswa yang sudah diwisuda dan mahasiswa yang memang non aktif.
2. Terkait dengan data mahasiswa aktif dan non aktif ini maka jumlah mahasiswa menjadi tidak sama dan tidak sinkron, sehingga dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan

ketidakseimbangan data tersebut.

3. Selain data keaktifan, masalah lain yang menjadi hambatan adalah formulir online yang diisi oleh mahasiswa ada yang belum lengkap, seperti tidak mengisi tempat lahir, alamat asal, dan bahkan ada yang tidak mengisi jenis kelamin sehingga ini juga menyulitkan bagi tim untuk melakukan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin atau gendernya.

Dari sisi data dosen, juga masih ada hambatan. Hal ini karena data yang diisi pada sistem kepegawaian UIN SU masih banyak yang belum mengisi, sehingga hanya sebagian data dosen dan pegawai saja yang bisa diproses untuk dihimpun ke dalam sistem ini.

KESIMPULAN

Statuta dan Renstra UIN Sumatera Utara belum secara khusus menerangkan tentang sistem dan program pembelajaran dan

manajemen lembaga yang adil gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, tetapi statutanya masih dalam proses untuk membuat kebijakan yang adil gender.

Tahapan Aktifitas yang dilakukan untuk membuat sistem data pilah gender yang terintegrasi adalah:

- a. Observasi dan survei ke semua fakultas dan unit kerja terkait sitem data pilah gender di unit masing-masing
- b. Setelah survei, ditemukan bahwa sistem informasi yang tersedia belum merupakan sistem informasi yang terpilah gender.
- c. Melakukan sosialisasi terkait data hasil survei tentang kondisi data pilah gender UIN Sumatera Utara dan pentingnya data pilah gender di perguruan tinggi.
- d. Mempersiapkan tim ahli atau programmer sistem data pilah gender berkoordinasi dengan

tim Pusat Teknologi Informasi dan Data (Pustipada) UIN SU.

- e. Mengadakan workshop pembuatan data pilah gender dan membuat sistem yang eksisting yang terintegrasi dan terinterkoneksi untuk data pilah gender di UIN Sumatera Utara.
- f. Membuat kebijakan dan regulasi terkait legalitas sistem data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi.

Dengan adanya data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi, maka format pembelajaran dan perkuliahan, beasiswa, jabatan dan kedudukan dosen dan pegawai dan berbagai kebijakan dan program terkait

pembelajaran dapat diputuskan berdasarkan perspektif gender untuk pemerataan penerima manfaat secara adil yaitu tidak hanya melihat kepentingan dan kondisi laki-laki tetapi juga perempuan, begitu juga sebaliknya.

Dari penelitian ini dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut : Perlunya mempersiapkan keputusan resmi berupa SK Rektor atau statuta yang mendukung pengelolaan dan eksistensi sistem data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi. Diharapkan kepada semua pihak baik dari pejabat pembuat komitmen, ataupun dosen dan pegawai dapat memanfaatkan sistem data pilah gender ini untuk kemajuan UIN Sumatera Utara yang juara.